

KEBIJAKAN TONY ABBOTT SEBAGAI PERDANA MENTERI AUSTRALIA

(2013-2015)

JURNAL



Oleh:

ARI WARDANI

13406241056

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2017

KEBIJAKAN TONY ABBOTT SEBAGAI PERDANA MENTERI AUSTRALIA (2013-2015)

Penulis 1: Ari Wardani

Penulis 2: M. Nur Rokhman, M. Pd

Universitas Negeri Yogyakarta

ari.shirro@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang kehidupan Tony Abbott; (2) kebijakan sosial dan ekonomi Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015); (3) kebijakan politik dan pertahanan keamanan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015); dan (4) dampak kebijakan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima langkah. Langkah pertama ialah menentukan topik penelitian, langkah kedua ialah pengumpulan sumber, langkah ketiga ialah verifikasi, langkah keempat ialah interpretasi, dan langkah terakhir ialah historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tony Abbott tumbuh dalam keluarga yang berharap ia akan menjadi Paus atau Perdana Menteri. Ia lulusan Universitas Sydney dan Oxford. Ia menjadi jurnalis kemudian bergabung dengan Partai Liberal yang membawanya menjadi pejabat pemerintahan. (2) Kebijakan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintahan PM Abbott antara lain: mencegah kedatangan pencari suaka, meningkatkan taraf hidup suku Aborigin, penyederhanaan prosedur adopsi anak, menangani isu pernikahan sesama jenis, memberlakukan kembali gelar kebangsawanan, membantu mengidentifikasi pesawat jatuh, mengatasi penyebaran virus Ebola, menolak memberi bantuan industri, memotong anggaran negara, menghapus pajak karbon, perdagangan bebas, ekspor uranium ke India, dan bergabung dengan AIIB. (3) Kebijakan politik dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan pemerintahan PM Abbott antara lain: pembentukan kabinet dan perombakan kementerian, politik luar negeri Australia dengan Indonesia, menarik pasukan dari Afganistan, mewaspadaai tindakan terorisme di dalam negeri, dan melawan ISIS. (4) Seluruh kebijakan tersebut menimbulkan dampak pro maupun kontra bagi Australia dan kelangsungan pemerintahan PM Abbott.

Kata kunci: *Tony Abbott, Perdana Menteri, kebijakan, Australia*

THE POLICIES OF TONY ABBOTT AS PRIME MINISTER OF AUSTRALIA (2013-2015)

Author 1: Ari Wardani

Author 2: M. Nur Rokhman, M. Pd

ari.shirro@gmail.com

Abstract

The policies of Tony Abbott as Prime Minister of Australia has not been much studied. This study aims to investigate: (1) the background of Tony Abbott's life; (2) the social and economic policies of Tony Abbott as Prime Minister of Australia (2013-2015); (3) the political and defense policies of Tony Abbott as Prime Minister of Australia (2013-2015); and (4) the impacts of the policies of Tony Abbott as Prime Minister of Australia (2013-2015).

The study used Kuntowijoyo's historical research method consisting of five steps. The first was research topic selection, the second was source collection, the third was verification, the fourth was interpretation, and the last was historiography.

The results of the study refer: (1) Tony Abbott grew up in a family expecting he would become Pope or Prime Minister. He graduated from the University of Sydney and Oxford. He became a journalist and then joined the Liberal Party which led him to become a government official. (2) The social and economic policies implemented by PM Abbott's government included: preventing the arrival of asylum seekers, improving Aboriginal living standards, simplifying child adoption procedures, dealing with issues of the same-sex marriage, re-enforcing noble titles, helping to identify falling planes, overcoming the spread of the Ebola virus, refusing to provide industrial aids, cutting the state budget, abolishing the carbon tax, supporting free trade, exporting uranium to India, and joining the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). (3) The political and defense policies implemented by PM Abbott among others included: the formation of cabinet and ministerial reshuffle, Australian foreign policies with Indonesia, troop withdrawal from Afghanistan, alertness of terrorist movements within the country, and counter-measures against ISIS. (4) All such policies had pro and contra-impacts on Australia and the continuity of PM Abbott's government.

Keywords: *Tony Abbott, Prime Minister, policies, Australia*

I. Pendahuluan

Pemerintahan eksekutif di Australia dijalankan oleh menteri-menteri di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri dalam sebuah kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet ini berasal dari partai politik atau koalisi yang menduduki mayoritas kursi di parlemen. Perdana Menteri Australia yang berhenti menjabat pada tahun 2015 lalu adalah Perdana Menteri ke 28, Tony Abbott. Tony Abbott sendiri sudah dikenal dalam dunia politik Australia sebelum memenangkan Pemilu pada 7 September 2013 karena ia menjadi menteri di kabinet pemerintahan John Howard. Ia juga menjadi Ketua partai Liberal sejak 1 Desember 2009.

Tony Abbott memenangkan Pemilu 2013 dengan mengalahkan Perdana Menteri sebelumnya Kevin Rudd dari Partai Buruh. Ia berjanji dalam tiga tahun mendatang, pajak karbon akan hilang, pencari suaka akan berhenti ke Australia dan anggaran negara akan kembali ke jalur semula pada saat kampanye. Ia selalu disoroti karena kebijakannya menghalangi para pencari suaka selama masa pemerintahannya. Pemerintahan Tony Abbott juga diwarnai dengan penyadapan informasi yang dilakukan Australia pada Indonesia. Tony Abbott juga menarik duta besar Australia untuk Indonesia sebagai bentuk protes terhadap eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dua anggota *Bali Nine* pada April 2015. Kabinet dan anggota parlemen dari partai yang memerintah merasa khawatir tentang kinerja Tony Abbott. Hal tersebut mendorong Malcolm Turnbull menantang Tony Abbott untuk melakukan pemungutan internal Partai Liberal. Tony Abbott dikalahkan oleh Turnbull sebagai pemimpin Partai Liberal yang berkuasa pada 14 September 2015.

Peneliti tertarik untuk membahas tentang kebijakan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia karena kebijakan-kebijakan yang diambilnya cukup berani serta menimbulkan pro dan kontra baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masa jabatannya pun cukup singkat yakni dari 2013-2015 karena dikalahkan oleh Turnbull yang juga berasal dari Partai Liberal. Hal ini menarik untuk dikaji, bagaimana seorang Perdana Menteri kehilangan dukungan dari orang-orang di dalam partainya sendiri.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dapat digunakan untuk membantu penulis dalam mengkaji suatu penulisan dalam penulisan karya ilmiah, melalui buku-buku yang relevan maka dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan.

Pembahasan tentang latar belakang kehidupan Tony Abbott menggunakan buku karya David Marr yang berjudul *Political Animal: The Making of Tony Abbott*. Di dalam buku *Political Animal: The Making of Tony Abbott* dibahas mengenai latar belakang keluarga dan pendidikan Tony Abbott. Penulis juga menggunakan buku karya Tony Abbott sendiri yang berjudul *Battlelines*. Buku ini membahas tentang kehidupan Tony Abbott sebagai politikus dan sedikit kehidupan rumah tangganya sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.

Pembahasan mengenai kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia, penulis menggunakan sumber berupa surat kabar cetak, surat kabar online, dan jurnal dikarenakan buku yang membahas tentang masa pemerintahan Tony Abbott belum ada. Surat kabar cetak digunakan dalam penulisan ini sebagian besar dari harian Kompas karena proporsi berita internasional di koran ini lebih banyak daripada koran yang lain. Sedangkan

untuk berita online sebagian besar diperoleh dari radioaustralia.net.au yang isinya memang khusus memberitakan tentang negara Australia.

Pembahasan mengenai dampak kebijakan-kebijakan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia, penulis juga menggunakan sumber berupa surat kabar cetak, surat kabar online, dan jurnal. Hampir sama dengan sumber yang digunakan untuk bab-bab sebelumnya, sebagian besar diperoleh dari Harian Kompas, radioaustralia.net.au, dan sumber lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima langkah yaitu: menentukan topik penelitian, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Langkah pemilihan topik sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional antara penulis dengan topik yang diteliti yaitu ketertarikan pada hubungan internasional. Sedangkan kedekatan intelektual didasari karena kajian mengenai pemerintahan Tony Abbott masih sedikit.

Heuristik atau pengumpulan sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari artikel-artikel koran yang ditulis oleh wartawan yang menyaksikan secara langsung dan buku *Battlelines* karya Tony Abbott. Sumber sekunder berasal dari beberapa jurnal.

Kritik sumber ada dua aspek yang dikritik yaitu otentisitas (keaslian) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut atau biasa disebut kritik eksternal. Penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah dapat dipercaya atau tidak dikenal dengan kritik internal. Kritik eksternal yang dilakukan pada buku *Battlelines* yaitu, buku berbahasa Inggris sehingga penulis harus menerjemahkannya dalam Bahasa Indonesia. Sumber dari koran kertasnya masih bagus dan jelas dibaca. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan dan memilih sumber-sumber yang berhubungan dengan topik.

Interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan atau menggabungkan. Hasil analisis penulis dari berbagai data sejarah selanjutnya digabungkan sesuai topik yang dibahas.

Penulisan sejarah dalam penelitian ini dilakukan secara kronologis, membahas hubungan sebab akibat yang terjadi dan menggunakan imajinasi penulis dalam menulis mulai dari siapa sosok Tony Abbott, kebijakan-kebijakannya saat menjadi Perdana Menteri Australia dari awal hingga akhir, dan bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakannya saat menjadi Perdana Menteri Australia.

II. Pembahasan

A. Latar Belakang Kehidupan Tony Abbott

1. Keluarga Tony Abbott

Abbott lahir di London pada 4 November 1957 dengan nama Anthony John Abbott. Ayahnya, Dick Abbott adalah seorang dokter gigi dan pemeluk Katolik yang taat, sedangkan ibunya, Fay "Pete" Peters berprofesi sebagai konsultan diet. Beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1960 saat Abbott berusia tiga tahun, orangtuanya membawanya kembali ke Australia. Tiga anak perempuan lahir di keluarga Abbott, tetapi ambisi keluarga itu terpusat pada Abbott kecil. Abbott mulai

tertarik pada politik pada 1972, ketika guru sejarah kelas sembilan-nya memberi tugas membuat esai tentang partai-partai yang bertanding untuk pemilihan umum saat itu. Ia menonton orasi tentang kebijakan yang akan diusung Partai Buruh dan partai besar lainnya.

Abbott menikah dengan Margaret (Margie) Aitkin pada tahun 1988 dan dikaruniai tiga orang putri yaitu Louise, Bridget, dan Frances. Ia menyadari pekerjaannya sebagai seorang politikus memberi dampak pada orang-orang didekatnya, terutama keluarganya. Mereka bisa menjadi bahan berita karena berhubungan dengannya. Istrinya harus mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak hampir sendirian sejak ia menjadi anggota parlemen. Istrinya juga memiliki pekerjaan yang sibuk dan penuh tanggung jawab. Meski demikian, Margie selalu mendukung karir dan pekerjaan Abbott.

2. Pendidikan Tony Abbott

Abbott bersekolah di St. Aloysius dan kemudian St. Ignatius College, Riverview di Sydney pada tahun 1966 sampai 1975. Abbott menemukan mentornya di Riverview yaitu Emmet Costello, seorang pastor yang memiliki kepercayaan padanya. Costello menyarankan Abbott menjadi pastor dan ide itu melekat padanya selama belasan tahun kemudian.

Abbott masuk di Universitas Sydney pada awal tahun 1976. Ia belajar ilmu ekonomi dan hukum di sana. Ia sering mabuk, menulis, berargumen, bercinta dan bermain rugby. Ia berpolitik di *Democratic Club*, salah satu jaringan antar kampus di seluruh negeri yang didirikan dan dibimbing oleh *National Civic Council* (NCC) milik Bob Santamaria yang kemudian menjadi mentornya. Saat awal masuk kuliah ia masuk ke klub penulis *Democrat*. Ia memilih target untuk debutnya sebagai jurnalis dengan membahas tentang lesbian, homoseksual dan *Students' Representative Council* (SRC). Ia memenangkan suara di SRC dan di delegasi universitas untuk *Australian Union of Students* (AUS). Ia juga memenangkan pemilihan ketua SRC setelah dua kali mencoba pada September 1978. Ia mendapat gelar *Bachelor of Art* (B.A.) di ekonomi pada tahun 1979 dan hukum pada tahun 1981.

Abbott mendapat penghargaan Rhodes, yaitu kuliah S2 di Oxford pada bulan November. Ia belajar filsafat, ekonomi dan politik di sana. Ia menemukan mentor lain di Oxford, yaitu seorang calon pastor Jesuit dari Amerika, Paul Mankowski. Ia mulai bergabung dengan tim tinju universitas atas tawaran Mankowski. Ia memiliki pandangan bahwa ia tetap bisa menjadi pastor dan hidup seperti orang biasa berkat Mankowski.

Abbott memutuskan untuk masuk ke seminari St. Patrick di Manly pada 1984 setelah ia lulus kuliah. Akan tetapi, ia hanya bertahan selama tiga tahun. Ia mengatakan alasannya meninggalkan seminari lebih mendasar, salah satunya karena ia tidak memiliki keyakinan religius yang dalam untuk menjadi pastor.

3. Karir Tony Abbott

Abbott memulai karirnya sebagai jurnalis untuk *the Bulletin* dan *the Australian*. Ia bekerja sebagai sekretaris pers untuk John Newson, pemimpin oposisi dari tahun 1990 hingga 1993. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk *Australians for Constitutional Monarchy* pada tahun 1993 sampai 1994. Ia bergabung menjadi anggota Partai Liberal pada tahun 1994 dan bekerja di sana sebagai penasihat. Ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Warringah, New South Wales pada tahun yang sama. Ia diangkat menjadi menteri selama masa pemerintahan John Howard dari tahun 1996-2007.

Abbott maju dalam pemilihan ketua Partai Liberal melawan Malcolm Turnbull pada 1 Desember 2009. Ia mengalahkan Turnbull hanya dengan satu perbedaan suara yaitu 42 lawan 41. Ia mewakili Partai Koalisi Liberal-Nasional saat Pemilu bulan September 2013. Ia berjanji akan menghapus pajak, menghentikan pencari suaka ke Australia, dan anggaran negara akan kembali ke jalur semula, bahkan lebih. Ia memenangkan Pemilu pada 7 September 2013 dan menjadi Perdana Menteri Australia ke-28.

B. Kebijakan Sosial dan Ekonomi Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015)

1. Kebijakan Sosial

a. Mencegah Kedatangan Pencari Suaka

Kebijakan mencegah kedatangan pencari suaka ini dilatarbelakangi keprihatinan pemerintah Australia akan banyaknya korban tewas di laut dalam perjalanan mencari suaka. Kebijakan ini disebut dengan Operasi Perbatasan Berdaulat (*Operation Sovereign Borders/OSB*). PM Abbott juga mempertahankan kebijakan pemerintahan Kevin Rudd untuk mengirim pencari suaka lewat laut diproses di Papua Nugini dan Nauru jika terbukti para pencari suaka itu memang berstatus pengungsi. Pemerintah Australia tidak lagi memberikan visa *permanent residence* bagi imigran yang datang lewat kapal laut.

Pemerintah Australia melakukan usaha lain untuk mencegah pencari suaka dengan menaikkan tiga kali lipat masa penahanan anak-anak di dalam kamp imigrasi menjadi 349 hari. Pemerintah Australia menandatangani kesepakatan relokasi pencari suaka dari Australia ke Kamboja pada 26 September 2014 di Phnom Penh. Pemerintah Australia juga memperkenalkan kembali visa sementara untuk pencari suaka pada 5 Desember 2014.

Kebijakan mengatasi pencari suaka kembali menuai sorotan pada pertengahan tahun 2015. Petugas keamanan dan imigrasi Australia diberitakan menghadang perahu berisi 65 pencari suaka asal Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka yang hendak masuk wilayah perairan Australia. Aparat Australia membayar nahkoda dan awak kapal, masing-masing 5.000 dolar AS atau Rp 61 juta agar nahkoda dan awak kapal mau memutar balik arah kapal mereka.

b. Meningkatkan Taraf Hidup Suku Aborigin

PM Abbott membentuk Dewan Penasehat Suku Aborigin untuk mengatasi masalah masyarakat Aborigin pada 26 September 2013. Ia memenuhi janji menghabiskan satu minggu di lokasi masyarakat Aborigin di Nhulunbuy, Northern Territory untuk menegaskan perhatiannya pada masyarakat Aborigin. Seminggu setelah PM Abbott menyelesaikan tur sepekan di komunitas Aborigin, Pemerintah Australia mencapai kesepakatan 100 juta dolar dengan negara bagian Queensland, Australia Barat, Tasmania, dan Victoria. Dana itu digunakan untuk penyediaan layanan dasar bagi komunitas Aborigin yang tinggal di daerah terpencil. PM Abbott juga mendukung rencana pemerintah Australia Barat untuk menutup lebih dari 100 perkampungan warga Aborigin yang terletak di wilayah pedalaman. PM Abbott berkata "kita tidak bisa terus-terusan memberi subsidi kepada pilihan gaya hidup orang" sebagai dukungannya terhadap kebijakan pemerintah negara bagian tersebut.

c. Penyederhanaan Prosedur Adopsi Anak

Berdasarkan sistem sebelumnya, pasangan yang mengadopsi anak dari negara-negara yang belum menandatangani Konvensi Den Haag harus menunggu hingga 12 bulan sebelum mendapat persetujuan dari pengadilan Australia. Abbott melakukan perubahan yang akan berlaku bagi tiga negara yang bukan penandatanganan resmi Konvensi tersebut, tetapi mempunyai persetujuan bilateral dengan Australia. Rencana ini didukung dengan dibentuknya badan federal baru guna menangani adopsi dari luar negeri pada 2 Mei 2014.

d. Menangani Isu Pernikahan Sesama Jenis

Canberra menjadi wilayah pertama di Australia yang meloloskan aturan pernikahan sesama jenis pada 22 Oktober 2013. PM Abbott sebagai seorang pemeluk Katolik yang taat menegaskan, bahwa pasangan sesama jenis belum boleh menikah di wilayah Ibu kota Canberra sebelum terbit putusan dari Mahkamah Agung. Undang-undang itu akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan tinggi Australia pada 12 Desember 2013.

Pemimpin Partai Buruh Bill Shorten dan seorang anggota parlemen, Warren Entsch bahkan mengajukan Rancangan Undang-undang untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis. RUU yang bersifat inisiatif ini akan diserahkan ke DPR yang memutuskan RUU mana yang akan diprioritaskan untuk divoting. PM Abbott pun berjanji akan menyerahkan keputusan mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis kepada rakyat Australia sendiri setelah Pemilu berikutnya.

e. Memberlakukan Kembali Gelar Kebangsawanan

PM Abbott memberlakukan kembali gelar *knight* (kesatria/untuk laki-laki) dan *dame* (untuk perempuan) setelah gelar kebangsawanan itu dihapuskan oleh pemerintah Partai Buruh pimpinan Bob Hawke 30 tahun yang lalu. Ia merasa penghargaan yang ada tidak cukup untuk mengakui pencapaian dan prestasi sebagian orang Australia. Ia memberikan gelar Kesatria Ordo Australia kepada suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip pada 26 Januari 2015. Pemberian gelar kepada bangsawan Inggris ini membuat warga Australia protes karena bukan warga Australia yang mendapatkannya.

f. Membantu Mengidentifikasi Pesawat Jatuh

Beberapa kecelakaan pesawat terbang terjadi ketika PM Abbott memerintah. Hal ini mendorong Pemerintah Australia untuk membantu proses identifikasi. Pertama, pesawat Malaysia Airlines MH370 yang diperkirakan hilang di Samudera Hindia pada 8 Maret 2014. Kedua, Pemerintah Australia membantu pencarian pesawat AirAsia QZ8501 milik Indonesia berpenumpang 155 orang dan 7 awak yang diperkirakan hilang karena cuaca buruk. Ketiga, Pemerintah Australia mendesak dilaksanakannya investigasi internasional yang transparan atas insiden jatuhnya pesawat MH17 milik Malaysia Airlines, yang menewaskan 38 penumpang asal Australia. Pesawat tersebut diduga ditembak jatuh oleh "pemberontak pendukung Rusia" karena jatuh di daerah konflik antara Ukraina dan Rusia.

g. Mengatasi Penyebaran Virus Ebola

Pemerintah Australia memberikan bantuan 18 juta dolar guna mengatasi wabah Ebola di Afrika Barat. Bahkan pemerintah kota Sydney memutuskan tidak menerbitkan visa bagi negara-negara di Afrika Barat pada 28 Oktober 2014. Seperti yang dikatakan oleh Scott Morrison, semua visa nonpermanen

atau sementara dibatalkan. Pemegang visa permanen yang belum tiba di Australia akan diminta menaati masa karantina.

2. Kebijakan Ekonomi

a. Menolak Memberi Bantuan Industri

PM Abbott menyatakan, pemerintah Australia tidak akan memberikan bantuan dana lagi bagi industri mobil Holden yang kesulitan dana pada 6 Desember 2013. Holden mengkonfirmasi akan menghentikan produksinya di Australia pada 2017. Perusahaan mobil lainnya, yaitu Ford dan Toyota juga memutuskan segera menghentikan produksi setelah pemerintah menolak memberikan bantuan. PM Abbott mengatakan, jika menyediakan uang bukan cara yang tepat, terlebih perusahaan tersebut milik asing. Ford memutuskan menghentikan produksi mobil di Australia pada tahun 2016. Sementara perusahaan Toyota mengumumkan untuk menghentikan produksi mobil di Australia tahun 2017. PM Abbott juga menolak permohonan paket penyelamatan yang diajukan perusahaan pengolahan buah, SPC Ardmona pada akhir Januari 2014.

b. Memotong Anggaran Negara

Keadaan Ekonomi dan Keuangan yang hampir defisit menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran besar-besaran pada APBN 2014. Pemotongan anggaran terjadi di beberapa sektor, antara lain pada Lembaga *Environmental Defenders Offices* (EDO) dananya dipotong sebanyak 10 juta dolar (Rp 120 miliar), sehingga setelah 1 Juli 2014 EDO tidak menerima dana dari pemerintah sama sekali. Dana untuk skema pengurangan karbon melalui *Direct Action Plan* dipotong lebih dari 300 juta dolar. Uang tunjangan bagi ribuan tentara Australia yang bertugas di Timur Tengah dipotong sehubungan dengan penarikan pasukan Australia dari Afganistan. Sebanyak 36 lembaga pemerintahan dan 40 lembaga lainnya dinyatakan ditutup. Program-program bagi warga Aborigin dananya dipotong senilai 534 juta dolar untuk lima tahun berikutnya. *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) anggarannya dipotong 254 juta dolar selama 5 tahun. Bantuan dana pembangunan negara miskin dipotong sebanyak 4,5 miliar dolar (Rp 45 triliun).

c. Menghapus Pajak Karbon

PM Abbott mengatakan telah memenuhi janji kampanyenya setelah hasil *voting* Majelis Tinggi Parlemen Australia atau Senat memutuskan dihapuskannya pajak karbon. Pemungutan suara untuk menentukan pembatalan pajak karbon telah dimenangkan partai koalisi dengan suara 39 mendukung dan 32 menentang di Majelis Tinggi Parlemen pada 17 Juli 2014. PM Abbott menyatakan kebijakan ini bisa menghasilkan keuntungan rata-rata 550 dolar atau sekitar Rp 5,5 juta per tahunnya dengan turunnya harga gas sebanyak 7 persen dan listrik sebanyak 9 persen.

d. Perdagangan Bebas

PM Abbott mulai berbicara dan menemui para pemimpin negara lain untuk membahas perdagangan bebas. Ia bersama para menteri utama negara bagian serta pemimpin bisnis dari seluruh Australia mengunjungi Cina, Jepang, dan Korea Selatan pada April 2014. Ia menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara itu ketika di Korea. Ia dan PM Jepang,

Shinzo Abe menandatangani pakta perdagangan bebas dan kesepakatan keamanan. Ia dan Menteri Perdagangan Cina, Gao Hucheng menandatangani kesepakatan perdagangan bebas di Canberra pada 17 Juni 2015.

e. Ekspor Uranium ke India

PM Abbott menyampaikan harapannya untuk segera menandatangani kesepakatan penjualan uranium ke India di depan anggota parlemen di Canberra pada 3 September 2014, meskipun India belum menandatangani perjanjian non-poliferasi nuklir. Sebaliknya, Australia hendak menghentikan ekspor uranium ke Rusia karena peran negara itu pada krisis di Ukraina Timur. Australia sebelumnya pernah melarang penjualan uranium ke India, tetapi di bawah perjanjian baru ini pengiriman uranium dari Australia ke India bisa dimulai dalam kurun waktu 5 tahun kemudian.

f. Bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)

Australia menyatakan bergabung dengan AIIB dan siap menanamkan investasi 719 juta dolar AS pada 24 Juni 2015. Menteri Keuangan, Joe Hockey menandatangani perjanjian tersebut di Beijing pada 29 Juni 2015. Pemerintah Australia berharap, bank itu dapat membantu ekspor Australia yaitu komoditas mineral, produk pertanian, dan jasa.

C. Kebijakan Politik dan Pertahanan Keamanan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015)

1. Kebijakan Politik

a. Pembentukan Kabinet dan Perombakan Kementerian

PM Abbott mengumumkan susunan kabinetnya pada 16 September 2013. Susunan kabinet pemerintahannya terdiri dari 42 personel kementerian, termasuk asisten menteri dan sekretaris parlemen. Abbott juga melakukan perombakan di tingkat struktur kementerian, termasuk penggabungan Lembaga Donor Luar Negeri Australia (AusAID) ke dalam struktur Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Bea Cukai dan Unit Perlindungan Perbatasan dipindahkan strukturnya dari di bawah Kejaksaan Agung menjadi dibawah Menteri Imigrasi, Scott Morrison. Penempatan para pengungsi dan pendatang kemudian diurus oleh Kementerian Layanan Sosial dibawah menterinya, Kevin Andrews yang juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan lansia dan warga dengan disabilitas. Abbott mengumumkan *reshuffle* dalam susunan kabinetnya pada akhir tahun 2014.

b. Politik Luar Negeri Australia dengan Indonesia

PM Abbott memilih Indonesia sebagai prioritas utama untuk kebijakan politik luar negerinya. Akan tetapi, Australia dikabarkan melakukan penyadapan sinyal elektronik terhadap Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Sydney Morning Herald melaporkan bahwa Australia melakukan penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono, dan delapan menteri atau pejabat penting pemerintahan selama 15 hari pada Agustus 2009.

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia kembali bermasalah pada awal tahun 2015. Pemerintah Australia berusaha membujuk pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pemimpin Bali Nine. Abbott bahkan mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Australia dalam bantuan setelah tsunami tahun 2004 dan membayar kemurahan hati Australia dengan membatalkan eksekusi itu.

2. Kebijakan Pertahanan Keamanan

a. Menarik Pasukan dari Afganistan

PM Abbott mengumumkan penutupan pangkalan militer Australia di Tarin Kot, Uruzgan, Afganistan pada 16 Desember 2013. Lebih dari 25.000 tentara Australia telah ditugaskan di Afganistan selama 12 tahun. Berakhirnya misi Australia itu ditandai penarikan 1.500 tentara dari Uruzgan. Meski demikian, sebanyak 400 tentara Australia akan tetap bertahan di negara itu hingga 2014 untuk melatih dan menjadi penasihat militer lokal.

b. Mewaspadai Tindakan Terorisme di dalam Negeri

Maraknya tindak terorisme di dunia mendorong Australia untuk meningkatkan kewaspadaan pada gerakan-gerakan ekstremis. Pemerintah Australia memasukkan kelompok militan Boko Haram ke dalam daftar organisasi teroris. PM Abbott menemui para pemimpin komunitas Muslim di Australia untuk menyosialisasikan upaya-upaya pemerintah memberantas terorisme. Pengamanan di berbagai obyek vital di semua wilayah termasuk gedung parlemen juga ditingkatkan. PM Abbott melarang pengkhotbah radikal memasuki Australia pada 8 Oktober 2014, karena UU Anti-Terrorisme yang ada tidak melarang Hizbut Tahrir yang telah dilarang di beberapa negara.

Pemerintah Australia telah memperketat aturan dan pengamanan di dalam negeri. Akan tetapi, terjadi penyanderaan 17 warga sipil oleh pria bersenjata bernama Man Haron Monis, seorang imigran asal Iran, di Kafe Lindt, Martin Place, Sydney pada 15 Desember 2014. Penyanderaan selama 16 jam itu menewaskan tiga orang, termasuk Monis dan enam orang terluka, termasuk seorang polisi. PM Abbott mengumumkan penolakan pembayaran tunjangan kesejahteraan sosial bagi orang yang dianggap sebagai ancaman dan penarikan paspor bagi mereka yang memiliki dua kewarganegaraan, serta pengekangan perjalanan ke luar negeri. Pemerintah Australia juga bisa memenjarakan warga Australia selama 10 tahun jika terbukti bepergian ke daerah yang dilarang, di antaranya Irak dan Suriah.

c. Melawan ISIS

Lebih dari 100 warga Australia diperkirakan pergi ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. PM Abbott mengirim 600 personel militer ke Uni Emirat Arab untuk bergabung dengan AS pada 14 September 2014. Pengiriman pasukan tersebut bukan untuk berperang secara langsung, melainkan membantu upaya internasional dalam mencegah krisis kemanusiaan yang semakin parah di Irak. PM Abbott kembali mengirim sekitar 330 pasukan tambahan ke Timur Tengah pada 15 April 2015. Ia mengatakan, pasukan tersebut akan memulai misi dua tahun, yang sebagian besar dipekerjakan untuk melatih tentara Irak. Pemerintah Australia juga bekerja sama dengan Iran untuk berbagi data intelijen guna melacak warga Australia yang bertempur dalam kelompok ISIS.

D. Dampak Kebijakan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015)

1. Dampak Kebijakan Sosial dan Ekonomi

a. Dampak Mencegah Kedatangan Pencari Suaka

Kebijakan pemerintahan Tony Abbott untuk memulangkan pencari suaka lewat laut ke Indonesia mengundang kritik keras dari kelompok pembela hak asasi manusia dan Pemerintah Indonesia. Meskipun menuai kecaman, kebijakan itu berhasil menutup akses pencari suaka saat awal penerapannya. Menteri

Imigrasi yang baru, Peter Dutton menyampaikan, Australia telah mencegah lebih dari 600 pencari suaka dengan 20 kapal terpisah sejak memberlakukan kebijakan ini pada Desember 2013.

Keberhasilan pelaksanaan Operasi Kedaulatan Perbatasan tersebut memberi dampak bagi para pencari suaka. Para pencari suaka yang dihalau kembali ke wilayah Indonesia mengaku mendapat perlakuan kasar sebelum ditelantarkan di lautan oleh personel Angkatan Laut Australia. Para pencari suaka yang ditempatkan di rumah detensi imigrasi banyak melakukan aksi protes dan menggugat Pemerintah Australia ke pengadilan. Seperti ratusan pencari suaka di Pulau Manus, Papua Nugini berunjuk pada pertengahan Januari 2015. Menurut mereka, penempatan di lokasi baru tersebut rentan terhadap serangan warga Papua Nugini yang menolak kehadiran pencari suaka.

b. Dampak Meningkatkan Taraf Hidup Suku Aborigin

Pernyataan PM Abbott mengenai pilihan gaya hidup warga Aborigin saat mendukung rencana pemerintah Australia Barat untuk menutup perkampungan Aborigin pada 11 Maret 2015 menuai kecaman dari berbagai pihak. Rencana itu pun ditolak oleh ribuan warga dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kota Melbourne. Sementara itu, rencana referendum konstitusi Australia untuk mengakui penduduk pribumi belum terealisasi karena direncanakan baru selesai pada tahun 2017.

c. Dampak Penyederhanaan Prosedur Adopsi Anak

Komitmen pribadi Tony Abbott guna mereformasi sistem adopsi di Australia membuahkan hasil. Keluarga di Australia diizinkan untuk mengadopsi anak dari Afrika Selatan untuk pertama kalinya pada masa pemerintahan PM Abbott. Hal ini memberi kelegaan bagi masyarakat Australia yang berniat mengadopsi anak asal Afrika Selatan.

d. Dampak Penanganan Isu Pernikahan Sesama Jenis

Pembatalan undang-undang yang mengizinkan pernikahan sesama jenis di Canberra mengakibatkan sebanyak 27 pasangan sesama jenis yang menikah dinyatakan tidak sah. Para politisi pendukung legalisasi pernikahan sesama jenis mendorong Parlemen segera melakukan pemungutan suara berdasarkan pilihan hati nurani anggota, bukan menurut garis kebijakan partai politik. Akan tetapi, PM Abbott lebih memilih untuk menunda hingga pemilu berikutnya. Ia menyarankan isu ini diserahkan keputusannya kepada rakyat Australia sendiri, apakah melalui mekanisme plebisit atau referendum.

e. Dampak Memberlakukan Kembali Gelar Kebangsawanan

PM Abbott mendapat kritik keras setelah memberi bintang penghargaan sipil tertinggi Australia kepada Pangeran Philip. Anggota parlemen Australia dari Partai Liberal, Luke Simpkins secara resmi mengajukan mosi bagi digelarnya pemungutan suara untuk menentukan kepemimpinan Abbott. Pemungutan suara dilakukan dalam rapat Partai Liberal pada 9 Februari 2015. Hasil dari pemungutan suara terhadap 101 anggota parlemen asal Partai Liberal, terdapat 39 suara mendukung upaya pemakzulan, 1 suara dianggap tidak sah, dan 61 suara mendukung Abbott. Abbott mengatakan, ia tidak akan lagi terlibat dalam menentukan orang berhak menerima gelar kehormatan dari Australia lagi.

f. Dampak Membantu Mengidentifikasi Pesawat Jatuh

Upaya Pemerintah Australia untuk membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 tidak membuahkan hasil. Sementara pesawat AirAsia QZ8501

yang jatuh pada 28 Desember 2014 berhasil ditemukan beserta jasad para korban. Pemerintah Australia memutuskan untuk membuka kedutaan besar dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan militer di Kiev, Ukraina pasca penembakan pesawat MH17. PM Abbot menyatakan upaya ini dilakukan untuk mendukung sembilan penyidik polisi federal Australia yang tengah menyelidiki di sana pada 3 September 2014.

g. Dampak Mengatasi Penyebaran Virus Ebola

Kebijakan PM Abbott untuk tidak mengirim warga Australia menangani penyebaran virus Ebola dan tidak menerbitkan visa bagi negara-negara di Afrika Barat menimbulkan kecaman dari para pakar kesehatan, pegiat hak-hak asasi manusia, dan kelompok oposisi lokal. Komite Nasional Keamanan Kabinet memutuskan untuk memberikan bantuan kepada para sukarelawan yang akan berangkat ke Sierra Leone. Pemerintah Australia membangun sebuah pusat pengobatan pasien Ebola di Sierra Leone yang diresmikan pada 14 Desember 2014. Pemerintah Australia juga mendukung keberadaan fasilitas tersebut dan meningkatkan bantuan hingga sebesar 25 juta dolar.

h. Dampak Menolak Memberi Bantuan Industri

PM Abbott mengumumkan paket bantuan penciptaan lapangan kerja bagi mantan pekerja Holden di Australia Selatan dan Victoria pada 18 Desember 2013. Pendanaan paket senilai 100 juta dolar ini diambil dari kas pemerintah federal sebesar 60 juta dolar, dari Pemerintah Victoria 12 juta dolar, dan dari Holden sendiri diharapkan menyumbang 20 juta dolar. Pemerintah Australia akhirnya mengembalikan subsidi senilai 100 juta dolar untuk industri mobil pada Mei 2015. Pemerintah Australia juga menghapus berbagai rintangan yang menghalangi konsumen untuk membeli mobil baru dari luar negeri pada akhir 2015. Kebijakan ini diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen untuk membeli mobil murah, saat seluruh industri mobil Australia menghentikan produksinya pada tahun 2017.

i. Dampak Memotong Anggaran Negara

Rating Tony Abbott turun ke titik terendah pasca pengumuman APBN pada awal Mei 2014. Pemotongan anggaran diberbagai lembaga dan penutupan lembaga pemerintahan, mengakibatkan banyak pekerja di Australia kehilangan lapangan kerja. Ribuan warga juga berunjuk rasa di berbagai wilayah di Australia untuk memprotes kebijakan anggaran tersebut. Pemerintah Australia kemudian menaikkan gaji personel militer Australia menjadi 2 persen setiap tahun selama tiga tahun berikutnya. Keputusan tersebut disampaikan PM Abbott pada 4 Maret 2015 untuk mengurangi kebijakan yang menimbulkan kecaman masyarakat.

j. Dampak Penghapusan Pajak Karbon

Menurut Pemerintah Australia, pencabutan pajak karbon memberi keuntungan bagi masyarakat. PM Abbott menyatakan bahwa setiap rumah tangga akan diuntungkan sebanyak rata-rata 550 dolar atau sekitar Rp 5,5 juta per tahunnya dengan turunnya harga gas sebanyak 7 persen dan listrik sebanyak 9 persen. Warga Australia tidak harus mengeluarkan tambahan biaya lainnya untuk keperluan sehari-hari karena ketentuan pajak karbon yang dinilai terlalu tinggi untuk kalangan rumah tangga di Australia.

k. Dampak Perdagangan Bebas

Perjanjian perdagangan bebas khususnya dengan Cina memberi harapan pertumbuhan ekonomi Australia. PM Abbott mengatakan, warga Australia akan semakin murah membeli mobil, pakaian dan barang-barang elektronik yang diimpor dari Cina. Australia bisa meningkatkan 85 persen ekspor ke Cina, termasuk ekspor batu bara yang bebas dari bea cukai. Kantor-kantor hukum dan pengacara Australia juga lebih leluasa untuk beroperasi di pasar Cina yang luas. Akan tetapi, kebijakan ini memungkinkan perusahaan Cina dan pekerja migran dari negara lain untuk masuk ke Australia. Perusahaan yang memiliki proyek di Australia bernilai lebih dari 115 juta dolar juga diizinkan membawa pekerja dari Cina.

1. Dampak Kesepakatan Ekspor Uranium ke India

Kerjasama penjualan uranium ke India menjadi peluang besar bagi Pemerintah Australia untuk meningkatkan perekonomian Australia dan mempererat hubungan kemitraan strategis antara India dan Australia melalui *Australia-India Strategic Partnerships*. India dapat merealisasikan rencana pengembangan penggunaan energi nuklirnya dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Australia. Perusahaan pertambangan di Australia juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pembukaan pasar ekspor baru.

Kerjasama Australia dan India menjadi jembatan bagi Australia untuk memperkuat posisinya dikawasan Indo-Pasifik dan juga wilayah Samudra Hindia. Australia dan India juga tergabung dalam keanggotaan *The Indian Ocean Rim Association*, Forum Regional ASEAN, *East Asia Summit*, dan negara-negara G-20, yang memiliki kesamaan visi dalam menghadapi isu-isu permasalahan regional maupun internasional. Meskipun demikian, India belum meratifikasi NPT, sehingga Australia dianggap “diskriminasi pembeli” oleh komunitas internasional dikarenakan India merupakan negara yang memiliki senjata nuklir.

m. Dampak Bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)

AIIB diharapkan dapat membuka peluang besar bagi Australia untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra dagang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. AIIB yang akan bekerja sama dengan sektor privat, bisa membuka jalan bagi bisnis Australia untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan infrastruktur di kawasan Asia. Akan tetapi, AIIB baru resmi terbentuk pada tahun 2016 saat Tony Abbott sudah lengser.

2. Dampak Kebijakan Politik dan Pertahanan Keamanan

a. Dampak Pembentukan Kabinet dan Perombakan Kementerian

PM Abbott mendapat kritik karena hanya memasukkan satu perempuan di dalam kabinetnya, yaitu Julie Bishop sebagai Menteri Luar Negeri. Meski demikian, ia membuka peluang bagi perempuan untuk masuk ke dalam kabinetnya. Sementara itu, penggabungan AusAID kedalam struktur Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mengakibatkan pembatalan penerimaan sarjana baru untuk AusAID yang seharusnya masuk tahun 2014.

b. Dampak Politik Luar Negeri Australia dengan Indonesia

Penyadapan sinyal telekomunikasi yang dilakukan intelijen Australia pada pemerintah Indonesia menyebabkan hubungan Australia-Indonesia renggang. Pemerintah Indonesia memutuskan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath Kesoema guna melakukan koordinasi dan konsolidasi.

Pemerintah Indonesia juga memutuskan menghentikan sementara kerja sama intelijen dan militer, termasuk penanganan pencari suaka ke Australia. Meskipun Pemerintah Indonesia akhirnya mengirim kembali Duta Besar untuk Australia untuk normalisasi hubungan di antara kedua negara pada Mei 2014.

PM Abbott juga menemui Presiden SBY di Batam pada 4 Juni 2014. Mereka bertemu untuk membahas isu kerja sama dan berbagai informasi intelijen, seperti pemuda yang akan berangkat ke Suriah. Hubungan Indonesia dan Australia kembali dipulihkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai tata perilaku oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada 28 Agustus 2014 di Laguna Hotel, Nusa Dua, Bali.

PM Abbott berusaha agar eksekusi Duo Bali Nine dibatalkan Pemerintah Indonesia, enam bulan sejak pulihnya hubungan dengan Indonesia pada pertengahan Februari 2015. Pendapat Abbott tentang Indonesia yang hendaknya membalas bantuan pasca tsunami 2004 mengundang reaksi keras, baik dari rakyat Australia maupun dari warga Indonesia. Warga Indonesia, khususnya rakyat Aceh, mengumpulkan koin sebagai aksi solidaritas. 'Koin Untuk Australia' yang dikumpulkan warga Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia.

c. Dampak Penarikan Pasukan dari Afganistan

Pemerintah Australia mengumumkan menerima 800 warga Afganistan beserta keluarga mereka untuk tinggal di Australia setelah memutuskan untuk menarik pasukan militer dari negara itu. Para warga tersebut telah berjasa membantu tentara Australia yang bertugas di Afganistan. Menurut Morrison, ke-800 orang warga Afganistan itu diterima lewat program tahunan penerimaan pendatang atas dasar kemanusiaan yang kuotanya telah dikurangi menjadi 13.730 orang pada 2013.

d. Dampak Mewaspada Tindakan Terorisme di dalam Negeri

Kebijakan Pemerintah Australia untuk memperketat pengawasan di dalam negeri berdampak pada kehidupan umat Muslim yang dipenuhi tekanan dan gangguan. PM Abbott mengatakan bahwa langkah pengamanan itu tidak mengincar umat Muslim saja. Pelarangan terhadap penceramah radikal memasuki Australia mengakibatkan beberapa tokoh Muslim merasa tidak mendapat keadilan serta mendapat ancaman dari kelompok-kelompok yang tidak toleran. Kelompok Islam di Australia juga khawatir kebijakan Abbott akan menimbulkan pandangan negatif tentang Islam mayoritas di Australia.

e. Dampak Melawan ISIS

Misi kemanusiaan yang dilakukan Australia ke Timur Tengah berlanjut pada kesediaan Australia untuk menampung pengungsi dari Suriah. PM Abbott menyebutkan, Australia telah menerima tambahan 4.500 pengungsi pada 2014 dan 12 ribu pengungsi pada tahun 2015 yang diprioritaskan dari kalangan minoritas. Pemerintah Australia menetapkan penerimaan jumlah pengungsi dari seluruh dunia sebesar 13.750 orang pada tahun 2015. Pemerintah Australia juga telah merencanakan untuk menerima tambahan pengungsi setiap tahun menjadi 16.750 orang pada 2017 dan 18.750 orang untuk tahun 2018.

3. Lengsernya Perdana Menteri Tony Abbott

PM Abbott berhasil mempertahankan jabatannya pada pemungutan suara di Partai Liberal pada Februari 2015. Meski demikian, tingkat popularitasnya di hadapan publik

Australia telah menurun. Abbott ditantang oleh Malcolm Turnbull sebagai ketua Partai Liberal dan Perdana Menteri. Turnbull mengumumkan tantangan itu sekaligus mengundurkan diri sebagai Menteri Komunikasi Australia pada 14 September 2015 di halaman gedung parlemen Canberra. PM Abbott pun menerima tantangan Turnbull. Ia segera mengumumkan dilaksanakannya pemungutan suara untuk memilih ketua dan wakil ketua Partai Liberal pada hari yang sama. Ia dikalahkan Malcolm Turnbull dengan perbandingan suara 44 banding 54 pada pemungutan suara tersebut. Hal itu membuat Abbott kehilangan jabatannya sebagai PM dan Ketua Partai Liberal.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dalam Kebijakan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia (2013-2015), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tony Abbott lahir dengan nama asli Anthony John Abbott pada 4 November 1957 di London. Ia tumbuh dalam keluarga Katolik yang mendukungnya agar menjadi Paus atau Perdana Menteri. Ia kuliah S1 di Universitas Sydney dan S2 di Universitas Oxford. Ia mulai berkarir sebagai jurnalis dan memulai karir politiknya sebagai sekretaris pers John Newson. Ia diangkat menjadi menteri di kabinet pemerintahan John Howard hingga tahun 2007. Ia kemudian terpilih menjadi Ketua Partai Liberal pada akhir 2009 dan memenangkan pemilu pada 7 September 2013.
2. Pemerintahan Abbott segera mencegah kedatangan pencari suaka setelah pelantikannya. PM Abbott berusaha meningkatkan taraf hidup suku Aborigin dengan 'blusukan' ke pemukiman mereka. Ia memotong banyak anggaran dalam APBN dan mewujudkan janji kampanyenya untuk menghapus pajak karbon. Ia juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara Asia, menyetujui ekspor uranium ke India, dan bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).
3. PM Abbott merombak kementerian dan sempat melakukan *reshuffle* dalam kabinetnya. Sementara untuk hubungan luar negeri, ia memprioritaskan Indonesia sebagai negara tetangga. Meskipun hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang-surut dikarenakan masalah pencari suaka, penyadapan, dan eksekusi narapidana asal Australia. Adanya warga Australia yang bergabung dengan ISIS mendorong PM Abbott untuk memperketat keamanan Australia dan mengirimkan pasukan militer ke Irak.
4. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan PM Abbott memberikan dampak pada Australia dan kelangsungan pemerintahannya. Kebijakan menolak pencari suaka yang mendapat banyak kecaman, meskipun berhasil mengurangi arus pencari suaka ke Australia. Pemberian gelar kebangsawanan kepada Pangeran Philip sempat membuatnya hampir dimakzulkan oleh anggota Partai Liberal lainnya. Pemotongan APBN mengakibatkan beberapa lembaga ditutup. Hubungan Australia dan Indonesia perlahan pulih menjelang akhir pemerintahan PM Abbott. Pemerintah Australia juga bersedia menampung para pengungsi yang menjadi korban peperangan di Irak. Meskipun PM Abbott berusaha mempertahankan jabatannya, tetapi ia lengser ketika Malcolm Turnbull mengalahkannya dalam pemungutan suara di Partai Liberal pada 14 September 2015

IV. Daftar Pustaka

Buku:

- Abbott, Tony. (2009). *Battlelines*. Melbourne: Melbourne University Publishing.
- Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

- Julius Siboro. (2012). *Sejarah Australia*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Marr, David. (2013). *Political Animal: The Making of Tony Abbott*. Australia: Black Inc.
- Tim Prodi Pendidikan Sejarah. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal:

- Albertus Wenau. (2014). "Perubahan Kebijakan Pajak Karbon ke Skema Perdagangan Karbon Pemerintah Australia Era Tony Abbott", *e-journal Hubungan Internasional*, Vol. 2, No. 4, hlm. 989-1004.
- Azahari Syafril. (2014). "Kepentingan Australia Menjual Uranium ke India Tahun 2011", *JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-19

Artikel Koran:

- Abdul Manan. *Tempo*. "Malcolm Turnbull dan Topi Tinggi". 16 September 2015, hlm. 29.
- Elok Dyah Messwati. *Kompas*. "Abbott Akan Temui Presiden RI di Batam". 3 Juni 2014, hlm. 8.
- Elok Dyah Messwati. *Kompas*. "Bishop: Kita Harus Tingkatkan Kepercayaan". 5 Juni 2014, hlm. 8.
- Kompas*. "Abbott Percepat Rapat Partai". 9 Februari 2015, hlm. 10.
- Kompas*. "Australia Akhiri Misi". 17 Desember 2013, hlm. 9.
- Kompas*. "Australia Bergabung di AIIB". 25 Juni 2015.
- Kompas*. "Australia Beri Visa Sementara". 6 Desember 2014, hlm. 9.
- Kompas*. "Australia Cegah 20 Kapal Sejak Tahun 2013". 7 Agustus 2015, hlm. 10.
- Kompas*. "Australia Desak PBB Adili Pelaku Penembakan MH17". 30 Juli 2015, hlm. 8.
- Kompas*. "Australia Dikecam Soal Ebola". 29 Oktober 2014, hlm. 10
- Kompas*. "Australia Kirim Pencari Suaka ke Kamboja". 27 September 2014, hlm. 10.
- Kompas*. "Australia Larang Masuk Pengkhotbah Radikal". 9 Oktober 2014, hlm. 8.
- Kompas*. "Australia Merasa Kecolongan". 17 Desember 2014, hlm. 9.
- Kompas*. "Australia Minati Kapal Selam Jepang". 9 Juni 2014, hlm. 9
- Kompas*. "Australia Siap Pasok Uranium untuk India". 4 September 2014, hlm. 10.
- Kompas*. "Australia Tingkatkan UU Anti Teror". 23 September 2014, hlm. 10.
- Kompas*. "Drama Selama 16 Jam Berakhir". 16 Desember 2014, hlm. 1 dan 15.
- Kompas*. "Kebijakan Imigrasi Dianggap Efektif". 23 Agustus 2014, hlm. 9.
- Kompas*. "Kesepakatan Berbagi Data Intelijen Dicapai". 21 April 2015, hlm. 10.
- Kompas*. "Malaysia Panggil Diplomat Singapura". 27 November 2013, hlm. 8.
- Kompas*. "Pemerintah Australia Dikecam Keras oleh Oposisi". 30 Oktober 2014, hlm. 10.
- Kompas*. "Pemerintah Tak Perlu Cegah Pencari Suaka". 22 November 2013, hlm. 1.
- Kompas*. "Pencari Suaka Dipulangkan". 19 September 2013.
- Kompas*. "Pencari Suaka Gugat Pemerintah Australia". 27 Agustus 2014, hlm. 8.
- Kompas*. "Pengungsi Tolak Penempatan". 21 Januari 2015, hlm. 8.
- Kompas*. "PM Abbott Berkantor di Daerah Terpencil". 16 September 2014, hlm. 9.
- Kompas*. "Suap Dinilai Sesuai Ketentuan". 17 Juni 2015.
- Kompas*. "WNI Banyak Terlibat". 23 Oktober 2013.
- Suara Merdeka*. "Australia Rombak Kebijakan Keamanan". 24 Februari 2015, hlm. 8.

Artikel Internet:

- Aningtias Jatmika. (2014). *Australia Akan Dirikan Kedutaan di Ukraina*. Tersedia pada <https://dunia.tempo.co/read/news/2014/09/04/120604522/australia-akan-dirikan-ke-dutaan-di-ukraina>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 13.47 WIB.
- Anna Henderson dan Australia Plus. (2015). *RUU Pernikahan Sesama Jenis Diajukan ke DPR Australia*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-08-17/ruu-pernikahan-sesama-jenis-diajukan-ke-dpr-australia/1482358>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 10.08 WIB.
- Anonim. (2013). *Australia prioritaskan 800 penerjemah dari Afghanistan*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-10-04/australia-prioritaskan-800-penerjemah-dari-afghanistan/1200298>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 18.27 WIB.
- _____. (2014). *Ford Australia Mulai PHK 300 Orang Bulan Juni*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-02-06/ford-australia-mulai-phk-300-orang-bulan-juni/1260506>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.01 WIB.
- _____. *Australia-China Tandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas*. Tersedia pada <http://www.voaindonesia.com/a/australia-china-tandatangani-perdagangan-bebas-/2828642.html>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 22.47 WIB.
- Emma Griffiths. (2013). *Abbott Umumkan Bantuan Atasi Dampak Penutupan Holden*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-18/abbott-umumkan-bantuan-atasi-dampak-penutupan-holden/1236540>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.20 WIB.
- _____. (2013). *Defisit Anggaran Australia Capai 123 Miliar Dollar*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-17/defisit-anggaran-australia-capai-123-miliar-dollar/1235874>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.21 WIB.
- _____. (2013). *PM Abbott Pecat Tiga Birokrat Senior*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-09-18/pm-abbott-pecat-tiga-birokrat-senior/1192556>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 18.46 WIB.
- _____. (2015). *Pemerintah Australia Tawarkan Kenaikan Gaji Tentara 2 Persen*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-03-04/pemerintah-australia-tawarkan-kenaikan-gaji-tentara-2-persen/1421297>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 13.31 WIB.
- Ervan Hardoko. (2013). *Hanya Tunjuk Satu Menteri Perempuan, Kabinet Tony Abbott Dikritik*. Tersedia pada <http://internasional.kompas.com/read/2013/09/16/1743467/about.html>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 21.20 WIB.
- _____. (2014). *Senat Australia Hapuskan Pajak Karbon*. Tersedia pada <http://internasional.kompas.com/read/2014/07/17/19503411/Senat.Australia.Hapuskan.Pajak.Karbon>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 19.13 WIB.
- Farid Assifa. (2015). *Australia Siap Tampung Tambahan Pengungsi Suriah*. Tersedia pada <http://internasional.kompas.com/read/2015/09/07/17441831/Australia.Siap.Tampung.Tambahan.Pengungsi.Suriah>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 12.23 WIB.

- Hanna Azarya Samosir. (2015). *Gelari Pangeran Philip Ksatria, PM Australia Dikritik*. Tersedia pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150126150642-113-27431/gelari-pangeran-philip-ksatria-pm-australia-dikritik/>. Diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 11.35 WIB.
- Latika Bourke. (2014). *Disederhanakan, Aturan Adopsi Anak ke Australia*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-03-04/disederhanakan-aturan-adopsi-anak-ke-australia/1274564>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 10.07 WIB.
- Louise Yaxley, Anna Henderson, dan Australia Plus. (2015). *Kabinet Australia Terbelah dalam Isu Pernikahan Sesama Jenis*. Tersedia pada <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-08-14/kabinet-australia-terbelah-dalam-isu-pernikahan-sesama-jenis/1481516>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 10.11 WIB.
- Ranny Utami. (2014). *Australia Kirim 600 Tentara untuk Hadapi ISIS*. Tersedia pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140915111638-134-3288/australia-kirim-600-tentara-untuk-hadapi-isis/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 12.03 WIB.

Yogyakarta, 18 Agustus 2017

Reviewer

Saefur Rochmat, S.Pd, M.Ir, Ph.D
NIP. 19681122 199403 1 001
Menyetujui,

M. Nur Rokhman, M.Pd
NIP. 19660822 199203 1 002